

TAHALUF SIYASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Analisa Terhadap Kerjasama Politik Partai Islam di Malaysia

Mualim

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

Email: alimjava@gmail.com

Abstrak

This article aims to analyse the practical of *tabaluf siyasi* which conducted by Islamic parties in Malaysia. Three main parties are studied in this article i.e. Partai Islam seMalaysia (PAS), Partai Amanah Negara (AMANAH) and *The United Malays National Organization* (UMNO). The main objective of this article is to study the concept of *tabaluf siyasi* in Islam and to assess whether political alliance which held by the three parties is appropriate with Islamic teaching. This study uses the library research and analysis content methods. The library research was used to obtain secondary data, while content analysis was used to analyse data. The result shows that the concept of *tabaluf siyasi* has appear in Islamic teaching even has practiced by Muslim since The Prophet Muhammad p.b.h era. The political alliance that hold by Islamic parties in Malaysia was not contradict with the concept of *tabaluf siyasi* in Islam. This political alliance model is good to be continued and emulated by another Islamic parties at another countries.

Artikel ini bertujuan untuk meneliti praktek *tabaluf siyasi* yang dijalankan oleh partai-partai Islam di Malaysia. Tiga partai utama diteliti dalam artikel ini yaitu Partai Islam seMalaysia (PAS), Partai Amanah Negara (AMANAH) dan *The United Malays National Organization* (UMNO). Objektif utama dari artikel ini adalah untuk meneliti konsep *tabaluf siyasi* dalam Islam dan menilai apakah kerjasama politik yang dijalankan oleh ketiga partai tersebut telah sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Kajian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan dan analisis kandungan. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, sedangkan analisis kandungan digunakan untuk menganalisa data. Hasil studi ini menunjukkan bahwa konsep *tabaluf siyasi* terdapat dalam ajaran Islam bahkan telah lama dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w. Kerjasama politik yang dijalankan oleh partai-partai Islam di Malaysia tidak bertentangan dengan konsep *tabaluf siyasi* dalam Islam. Model kerjasama politik ini baik terus dijalankan dan dicontoh oleh partai – partai Islam lain di negara lain.

Kata kunci : *Tabaluf siyasi*, kerjasama politik, partai Islam *maqasid al syari'ah*.

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia pada saat ini telah memberikan ruang yang cukup luas bagi rakyat untuk mengeluarkan pendapat termasuk membuat pilihan politik dalam setiap kali pelaksanaan pemilu. Pada sisi yang lain para elit dan praktisi politik – tidak terkecuali para elit dan praktisi politik Muslim - berlomba-lomba untuk mendirikan partai politik dan menjanjikan partainya mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang selanjutnya menawarkan diri untuk membentuk pemerintahan. Maka, tak ayal lagi, bermunculanlah partai – partai politik yang ikut bertarung setiap kali pesta demokrasi – baca pemilu – dilaksanakan. Fenomena *multy party* (berbagai partai) seringkali mewarnai dunia perpolitikan khususnya di negara-negara berkembang.

Kenyataannya, jarang dijumpai ada partai politik tunggal yang dominan dan menang dalam setiap kali pelaksanaan pemilu. Karenanya diperlukan adanya kerjasama antara beberapa partai untuk memungkinkan gabungan partai tersebut membentuk pemerintahan yang sah. Permasalahannya, bukan hal yang mudah untuk membentuk kerjasama atau gabungan antar partai, karena sudah barang tentu masing-masing partai mempunyai visi dan misi yang berbeda antara satu sama lain. Keadaan akan semakin rumit jika kerjasama tersebut harus dilakukan antara partai yang mempunyai ideologi yang jelas-jelas berbeda dan saling bertentangan, seperti misalnya antara partai Islam dan bukan Islam. Maka di sinilah pentingnya adanya konsep *tahaluf siyasi* yang mengatur serta memberi batasan tentang kerjasama antar partai politik khususnya antara partai politik Islam dan bukan Islam.

Malaysia sebuah negara majemuk dimana penduduknya terdiri dari tiga etnik utama yang berbeda yaitu Melayu, China dan India disamping suku-suku kecil lainnya, merupakan contoh yang cukup baik untuk melihat pelaksanaan *tahaluf siyasi*. Seperti halnya negara berkembang yang lain, di Malaysia juga terdapat banyak partai yang turut bertanding dalam setiap kali pelaksanaan Pemilu. Di antara partai-partai tersebut adalah Partai Islam seMalaysia PAS (yang merepresentasikan dirinya sebagai partai Islam dan konsisten memperjuangkan syariat Islam terutama sistem *hudud*), *The United Malays National Organization* – UMNO (partai Melayu yang komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat Melayu), *Democratic Action Party* – DAP (parti yang mayoritas pengurusnya China dan komitment memperjuangkan kepentingan masyarakat China, namun kebelakangan parti ini merubah *platform* menjadi partai yang lebih terbuka), *Malaysian Chinese Association* - MCA, *The Malaysian Indian Congress* - MIC, Partai Keadilan Rakyat - PKR (partai nasional yang didirikan oleh Anwar Ibrahim). Belakangan muncul partai-partai baru seperti Partai Amanah Negara – AMANAH (partai Islam moderat yang didirikan oleh mantan anggota PAS) dan Partai Pribumi Bersatu – BERSATU (partai ini didirikan oleh Mahatir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia sekarang), dan masih ada lagi partai-partai kecil lainnya. Keseluruhan partai itu – dalam pemilu terbaru di Malaysia 9 Mei 2018 – telah membentuk tiga koalisi besar yaitu Pakaratan Harapan atau PH (gabungan dari PKR, BERSATU, AMANAH dan DAP yang merupakan partai berkuasa sekarang), Barisan Nasional atau BN (terdiri dari UMNO, MCA, MIC dan beberapa partai lain, yang sebelum ini menjadi partai *incumbent* yang telah berkuasa lebih dari 61 tahun, namun tumbang dalam pemilu terkini) serta gabungan antara PAS bersama beberapa partai kecil yang tidak mau berpihak baik kepada Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional. Artikel ini akan membahas tentang konsep *tahaluf siyasi* dalam Islam dan meneliti pelaksanaan *tahaluf siyasi* yang dijalankan oleh tiga partai di Malaysia yang dianggap mewakili partai Islam dan umat Islam, yaitu PAS, UMNO dan AMANAH. Pengkatagorian UMNO sebagai partai Islam mungkin bersifat *debatetable* bagi sebagian orang. Dalam artikel ini penulis mendasarkan katagorisasi ini berdasarkan pada pandangan umum bahwa Melayu dan Islam adalah dua hal yang sudah identik dan tidak bisa dipisahkan. Melayu adalah Islam sedangkan Islam adalah Melayu. (Ghazali, dkk: 2011).

KONSEP TAHALUF SIYASI

Menurut Mohd Syakir Mohd Rosdi (2014) *tahaluf siyasi* berarti kerjasama antara dua atau lebih partai dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum Islam. Sedangkan Muhd Faiz Mukmin

Abdul Mutalib & Wan Fariza Alyanti Wan Zakaria (2015), mendefinisikan *tabaluf siyasi* sebagai sebuah strategi politik dengan cara bekerja sama dan bertujuan untuk mencapai matlamat atau objektif yang sama dengan kelompok – kelompok lain. Ia merupakan sebuah kesepakatan yang mempunyai jangka waktu tertentu dan tidak kekal. Dalam *National Democratic Institute* seperti dikutip Muhd Faiz Mukmin Abdul Mutalib & Wan Fariza Alyanti Wan Zakaria (2015) disebutkan berkaitan dengan *tabaluf siyasi* :

‘gabungan itu secara umum berarti kesatuan sementara di antara dua atau lebih khususnya partai-partai politik untuk mendapatkan pengaruh atau kemenangan yang lebih besar dibanding sendirian untuk mencapai matlamat mereka, yaitu dengan memfokuskan kepada tujuan yang sama, objektif yang sama dan membangun kekuatan dengan isu-isu yang mempunyai kepentingan bersama, seperti memenangkan pemilu atau meluluskan undang-undang atau pembentukan sebuah pemerintahan koalisi. Batas waktu perjanjian kerjasama tersebut akan berakhir dengan tercapainya tujuan yang ditetapkan. Semua anggota kerjasama tersebut hendaklah merasakan keuntungan atau menang selama proses perjanjian kerjasama berlangsung.

Sementara itu, *Muhammad Syukri Salleh & Mohd Syakir Mohd Rosdi (2014)* secara ringkas mendefinisikan *tabaluf siyasi* sebagai metode negosiasi kerjasama bilateral dalam menghadapi sebuah persoalan atau konflik sehingga cita-cita atau harapan dari pihak-pihak yang terlibat dapat tercapai sepanjang tidak lari atau melanggar prinsip-prinsip Islam.

Dari berbagai definisi *tabaluf siyasi* seperti disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa point yang hendak ada dalam *tabaluf siyasi* yaitu, *pertama*, adanya kerjasama antara dua atau lebih kelompok yang berbeda – dalam hal ini partai ; *kedua*, adanya tujuan atau matlamat yang ingin dicapai; *ketiga*, batas waktu ikatan perjanjian kerjasama itu tidak kekal melainkan ada batas waktu tertentu atau bahkan akan berakhir ketika matlamat atau tujuannya telah tercapai; *keempat*, semua pihak yang terlibat dalam ikatan perjanjian harus merasa mendapat keuntungan selama proses perjanjian berlangsung; *kelima*, isi perjanjian tidak boleh bertentangan atau melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam.

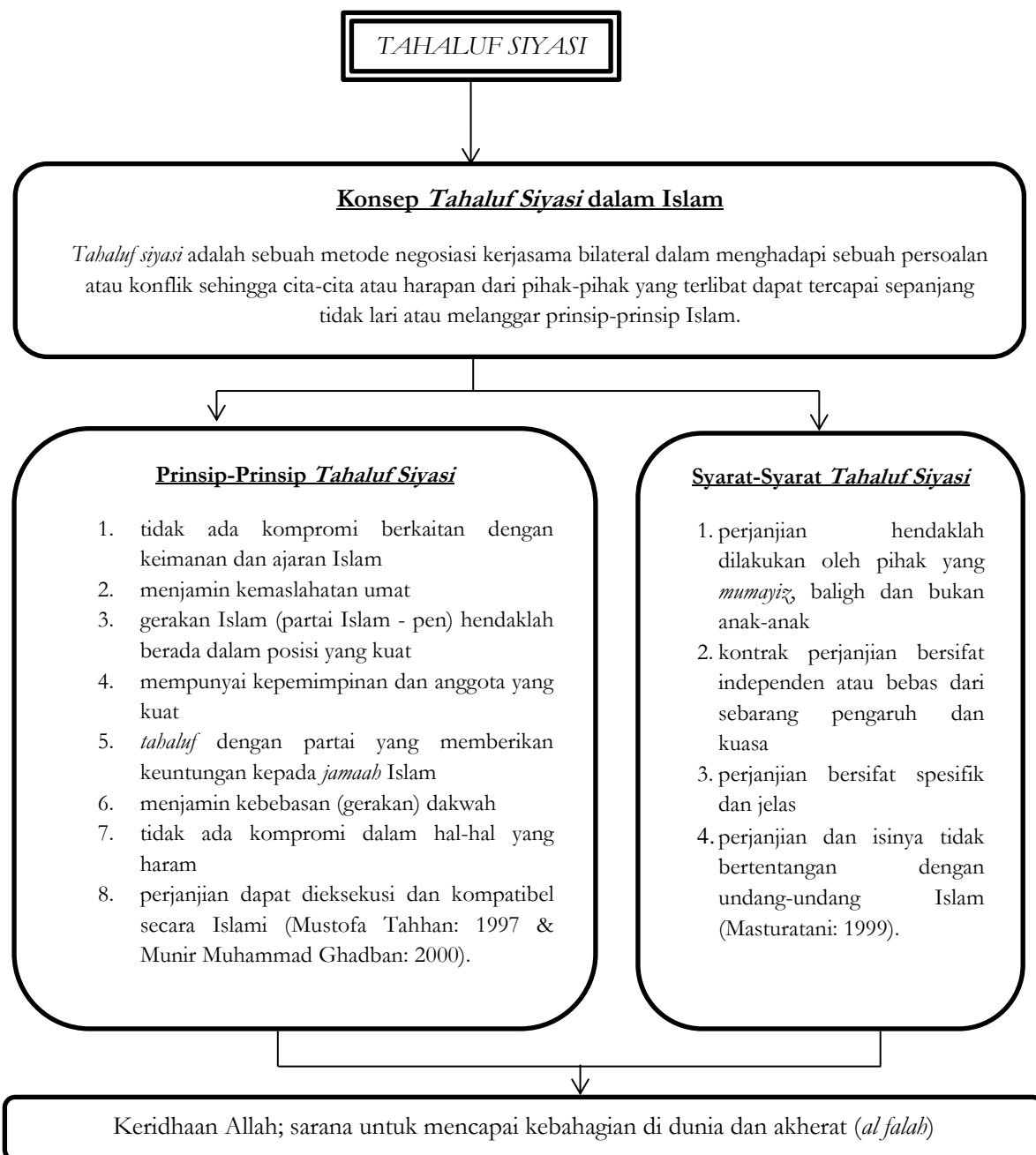
Menurut Mustofa Tahhan (1997) & Munir Muhammad Ghadban (2000) seperti dikutip Muhammad Syukri Salleh & Mohd Syakir Mohd Rosdi (2014), prinsip-prinsip *tabaluf siyasi* hendaklah meliputi:

- a. tidak ada kompromi berkaitan dengan keimanan dan ajaran Islam
- b. menjamin kemaslahatan ummat
- c. gerakan Islam (partai Islam - pen) hendaklah berada dalam posisi yang kuat
- d. mempunyai kepemimpinan dan anggota yang kuat
- e. *tabaluf* dengan partai yang memberikan keuntungan kepada *jamaah* Islam
- f. menjamin kebebasan (gerakan) dakwah
- g. tidak ada kompromi dalam hal-hal yang haram
- h. perjanjian dapat dieksekusi dan compatible secara Islami.

Selain itu, menurut Muhammad Syukri Salleh & Mohd Syakir Mohd Rosdi (2014), *tabaluf siyasi* hendaklah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- perjanjian hendaklah dilakukan oleh pihak yang *mumayyiz*, baligh dan bukan anak-anak
- kontrak perjanjian bersifat independen atau bebas dari sebarang pengaruh dan kuasa
- perjanjian bersifat spesifik dan jelas
- perjanjian dan isinya tidak bertentangan dengan undang-undang Islam (Masturatani: 1999).

Kerangka konsep *tabaluf siyasi* dalam Islam tersebut digambarkan dalam diagram berikut:



Sumber : Muhammad Syukri Salleh & Mohd Syakir Mohd Rosdi :2014

Diagram 1: Konsep, Prinsip dan Syarat – syarat *Tahaluf Siyasi*

Diagram 1 menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan *tahaluf siyasi* adalah untuk menggapai *mardhatillah* (keridhaan Allah) sebagai sarana atau jalan mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akherat.

HUKUM *TAHALUF SIYASI*

Terdapat banyak ayat al Qur'an yang membicarakan hubungan antara muslim dengan nonmuslim, meskipun tidak ada yang secara khusus membicarakan tentang *tahaluf siyasi*. Diantara ayat-ayat tersebut ada yang menyatakan larangan terhadap seorang Muslim menjadikan nonmuslim sebagai wali (teman dekat, pemimpin), seperti misalnya surat Al Maidah ayat 51. Namun tidak sedikit pula ayat – ayat yang membolehkan seorang Muslim berhubungan dengan nonmuslim terutama dalam hal-hal yang sifatnya *muamalah* (sosial kemasyarakatan). Di antaranya, Al Hujurat ayat 13, yang artinya:

Wahai manusia. Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...'

Ayat tersebut *kehitab*-nya bersifat umum, artinya ayat tersebut bukan saja ditujukan kepada umat Islam tetapi bahkan kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras dan bangsanya. Dalam ayat tersebut Allah s.w.t. menjelaskan bahwa seluruh manusia diciptakan oleh Allah s.w.t dan berasal dari keturunan yang sama. Allah s.w.t. sengaja menjadikan manusia berbeda-beda jenis suku, ras dan agama agar mereka saling mengenal dan sudah barang tentu saling bekerjasama antara satu sama lain.

Dalam surat Al Maidah ayat 2, Allah s.w.t. berfirman, yang artinya:

'...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.'

Ayat tersebut berisi perintah dari Allah s.w.t kepada umat Islam untuk senantiasa melakukan kerjasama dan saling tolong – menolong dengan baik sesama umat Islam maupun dengan umat lain. Namun kerjasama dan tolong – menolong tersebut hendaklah dilakukan dalam konteks kebajikan yang dapat membawa kemaslahatan. Sedangkan kerjasama dan tolong – menolong dalam melakukan perbuatan dosa (tercela) dan menyebarkan permusuhan adalah di larang dalam Islam.

Dalam surat Al Anfal ayat 61 Allah s.w.t berfirman, yang artinya:

'Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.'

Ayat tersebut mengisyaratkan dibolehkannya seorang Muslim berdamai dan bekerjasama dengan nonmuslim jika pihak nonmuslim condong atau menginginkan perdamaian.

Selain ayat-ayat al-Quran juga terdapat hadits – hadits yang membolehkan seorang Muslim berhubungan dan bekerja sama dengan nonmuslim. Diantaranya:

Dari Nafi' dari Abdullah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk digarap dan ditanami, dan bagi mereka separuh hasilnya. (H.R. Bukhari).

Dalam hadits yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda:

Dari Aisyah r.a. berkata: bahwa Rasulullah s.a.w membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w sering berhubungan dan mengadakan kerjasama dengan nonmuslim, khususnya dalam hal-hal yang sifatnya *muamalah*.

Adapun berkaitan dengan *tahaluf siyasi* sendiri sebenarnya secara praktek juga telah lama ada dalam sejarah Islam, bahkan konsep ini juga pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah s.a.w. Shukeri Muhammad (2009) seperti dikutip Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria (2015) menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w pernah mengadakan kerjasama politik dengan kelompok nonmuslim, diantaranya pada saat melakukan perjanjian Hudaibiyah pada tahun keenam Hijriah antara pemerintah Islam Madinah dengan orang Qurays Mekkah. Menurut Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria (2015) peristiwa ini membuktikan bahwa *tahaluf siyasi* memang pernah berlaku dalam sejarah Islam. Mengingat *tahaluf siyasi* merupakan antara sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. maka secara tidak langsung hukum melaksanakan *tahaluf siyasi* bagi umat Islam adalah mubah (Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria: 2015). Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qaradhawi ketika ditanya tentang hukum bergabung dengan pemerintahan bukan Islam. Beliau menjawab (Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria: 2015):

‘Tidak ada larangan untuk bergabung dengan pemerintahan nonmuslim yang sanggup menjalankan syariat Islam dan dibolehkan bersama nonmuslim atau siapa saja yang sanggup meminimalisir kedzaliman, keburukan dan kejahatan dengan cara apapun, maka dia harus melakukannya. Dia wajib menolong orang yang tertindas, membantu orang yang didzalimi, menguatkan orang yang lemah dan menyempitkan ruang dosa dan permusuhan.’

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa *tahaluf siyasi* dibolehkan dalam Islam asalkan memenuhi beberapa syarat seperti telah dibahas sebelumnya. Dan yang paling penting adalah isi perjanjian kerjasama dalam *tahaluf siyasi* tersebut tidak bertentangan atau melanggar undang-undang (*syari'ah*) Islam.

TAHALUF SIYASI PARTAI ISLAM DI MALAYSIA

Malaysia adalah negara majemuk yang penduduknya terdiri dari berbagai etnik yaitu Melayu, China, India dan beberapa etnik lain. Total jumlah penduduk Malaysia sekitar 27 jutaan. Berdasarkan data dari Departemen Statistik Malaysia tahun 2005 perbandingan penduduk Malaysia berdasarkan etnik adalah Melayu 65%, China 26%, India 8% dan etnik lainnya sebanyak 1% (Goh, at.al. 2005).

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, banyak partai yang turut serta bertanding setiap kali konstelasi politik – baca pemilu- diadakan. Sebagian partai

tersebut adalah partai perkauman yang didirikan dengan tujuan utama untuk menjaga dan memperjuangkan etnik tertentu, seperti *The United Malays National Organization* atau UMNO (partai politik yang merepresentasikan etnik Melayu), *Malaysian Chinese Association* (sebuah partai yang berafiliasi kepada kepentingan etnik China) dan *The Malaysian Indian Congress* atau MIC (sebuah partai yang berafiliasi kepada kepentingan etnik India), terbaru muncul Partai Pribumi Bersatu, sebuah partai Melayu yang didirikan oleh Mahatir Muhammad (Perdana Menteri Malaysia sekarang). Selain itu terdapat juga partai nasional seperti Partai Keadilan Rakyat atau PKR (yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim), *Democratic Action Party* atau DAP yang didirikan oleh politikus veteran China, Lim Kit Siang dan beberapa partai kecil lainnya. Adapun partai Islam di wakili oleh Partai Islam seMalaysia atau PAS yang dipimpin oleh Hadi Awang dan Partai Amanah Negara atau AMANAH yang dipimpin oleh Muhammad Sabu.

Meskipun banyak partai yang bertanding dalam pemilu, namun partai-partai tersebut melakukan kerjasama dan gabungan antar partai dan membentuk koalisi permanen dimana partai-partai Islam turut terlibat di dalamnya. Terdapat tiga kelompok partai koalisi pada saat ini yaitu Barisan Nasional atau BN yang terdiri dari UMNO, MCA, MIC dan beberapa partai lain. Dalam sejarah politik Malaysia BN selalu menang dalam pemilu dan gabungan partai ini telah memerintah Malaysia selama hampir 61 tahun (Mohd Hafizi Ahmad: 2018). Namun BN kalah dalam pemilu Malaysia yang diadakan pada 9 Mei 2018 lalu, sehingga kini menjadi partai oposisi. Selanjutnya adalah Pakatan Harapan atau PH yang terdiri dari Pribumi Bersatu, PKR, AMANAH dan DAP. Dalam pemilu baru-baru ini PH membuat kejutan karena mendapatkan perolehan suara yang cukup besar melebihi partai incumbent dan berhasil membentuk pemerintahan. Satu lagi gabungan partai oposisi adalah PAS bersama beberapa partai kecil.

Dalam pergerakan kerjasama dan gabungan antar partai di Malaysai, partai-partai Islam dilihat mempunyai peran yang cukup signifikan bahkan sebagiannya menjadi motor penggerak utama gabungan partai tersebut. UMNO sebagai sebuah partai Melayu Islam merupakan penggerak utama Barisan Nasional yang sebelum pemilu 9 Mei lalu selalu memenangkan pesta demokrasi di Malaysia. Sebelum ini, Perdana Menteri Malaysia selalu berasal dari tokoh-tokoh UMNO. Keberanian para pemimpin Melayu Islam dalam UMNO untuk menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh partai lain baik China maupun India yang sudah barang tentu nonmuslim, menurut penulis – terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam UMNO – menunjukkan sikap inklusif sekaligus merupakan salah satu bentuk *tabaluf siyasi* yang telah dipraktekan oleh partai tersebut. Seperti dinyatakan oleh Mohd Syakir Mohd Rosdi (2015) UMNO telah mempraktekkan *tabaluf siyasi* bersama BN.

Partai Islam lain yang turut mengadakan *tabaluf siyasi* adalah PAS. Dibanding partai lain, PAS merupakan partai Islam yang paling sering mengusung konsep *tabaluf siyasi* di Malaysia. Menurut Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria (2015) dalam tahun 1990-an saja PAS telah melakukan *tabaluf siyasi* sebanyak tiga kali, yaitu bersama Pakatan Perpaduan Ummah (APU), Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia (GERAK) dan Barisan Alternatif (BA). Bahkan sebelum tahun 90-an PAS pernah melakukan *tabaluf siyasi* dengan Perikatan yang kemudian bertukar nama menjadi Barisan Nasional (BN). Dalam tahun 2008 ketika Pakatan Rakyat (PR) yang kemudian bertukar menjadi Pakatan Harapan (PH) PAS turut bergabung dengan Partai tersebut. (Mohd Syakir Mohd Rosdi. 2015). Namun akhirnya PAS keluar dari Pakatan Harapan

karena perbedaan pandangan politik dengan komponen partai-partai lain dalam PH terutama dengan DAP. Menjelang pemilu ke-14, 9 Mei lalu, PAS kembali menggandeng beberapa partai kecil di luar komponen BN dan PH untuk melakukan *tabaluf siyasi*.

Selain UMNO dan PAS, Partai Amanah Negara (AMANAH) dilihat sebagai partai Islam yang juga melakukan pendekatan *tabaluf siyasi*. Partai ini didirikan oleh sebagian tokoh-tokoh Islam moderat mantan anggota PAS yang tersisih dalam pemilihan pucuk pimpinan partai tersebut ketika muktamar tahun 2015. ([https://amanah.org.my/sejarah/21 Mei 2018](https://amanah.org.my/sejarah/21%20Mei%202018)). Kemunculan AMANAH turut didukung oleh aktivis dakwah dari berbagai *Non Government Organization* atau NGO Islam diantaranya Pertubuhan Ikram Malaysia (IKRAM) dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). (Maszlee Malik.tth). Bergabungnya AMANAH dalam PH dilihat menggantikan peran PAS yang telah keluar sebelumnya. AMANAH menganut pendekatan yang lebih moderat dalam menjalankan *tabaluf siyasi* bersama partai komponen lain dalam PH. AMANAH menawarkan penerapan prinsip – prinsip *maqasid al syari'ah* dalam membangun Malaysia yang lebih baik. Prinsip *maqasid al syariah*, lebih mengedepankan nilai-nilai Islam, seperti keadilan sosial, *good governance*, dan pengakuan terhadap adanya pluralitas agama. (Maszlee Malik: tth). Menurut AMANAH penerapan prinsip *maqasid al syariah* dan *tabaluf siyasi* bukan berarti parti mengorbankan ideologi Islam, tetapi *maqasid al syariah* bertujuan untuk menunjukkan relevansi Islam dalam konteks kehidupan masyarakat modern dan masyarakat majemuk seperti Malaysia. (Maszlee Malik: tth).

KESIMPULAN

Tabaluf siyasi merupakan salah satu cara pendekatan politik untuk memperjuangkan Islam dalam konteks kehidupan modern dimana kebanyakan negara di dunia saat ini menerapkan sistem demokrasi. Tahaluf siyasi dijalankan dengan cara melakukan kerjasama antara dua atau lebih partai untuk mencapai tujuan yang sama atau untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Konsep ini telah lama terdapat dalam sejarah Islam bahkan telah dijalankan pada zaman Rasulullah s.a.w. Sebuah parti Islam yang ingin melakukan *tabaluf siyasi* hendaklah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan terutama isi perjanjian dalam *tabaluf siyasi* tersebut tidak boleh bertentangan atau melanggar undang-undang atau *syari'ah* Islam.

Malaysia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi telah lama mempraktekan konsep tahaluf siyasi. Partai-partai Islam di Malaysia terutama UMNO, PAS dan AMANAH telah melakukan *tabaluf siyasi* dengan cara-caranya masing. Namun, konsep *tabaluf siyasi* yang dipraktikkan oleh AMANAH melalui prinsip *maqasid al syari'ah* dilihat lebih moderat dibanding partai Islam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mohd. Hafizi. 2018. BN, UMNO perlu berubah untuk kembali berkuasa. *Jurnal Kosmo*. Edisi 12 Mei.
- Ghadban, Munir Muhammad. 1982. *Al-Tabaluf Al-Siyasi Fii al-Islam*. Al-Urdun: Maktabat al-Manar. Zarqa'.
- Ghadban, Munir Muhammad. 2000. *Kompromi Politik dalam Islam*. Jakarta Timur Indonesia: Pustaka Al Kautsar.

- Ghazali, Amir Saifude, dkk., 2011. Politik etnik Malaysia: analisis pasca Pilihan Raya Umum ke 12 mengenai sokongan bukan Melayu kepada UMNO dan PAS. *Geografia Malaysian Journal of Society and Space*. 7 (2): 18-27.
- Goh, Pik-Pin., et.al. 2005. Refractive error and visual impairment in school-age children in Gombak district, Malaysia. *American Academy of Ophthalmology*. 112 (4):678-689.
- Kassim, Yan Razali. 2017. After the Muktamar: is a new PAS emerging?. *RSIS Commentary*. 084-3 May.
- Malik, Maszlee. tth. Rethinking the role of Islam in Malaysian politics: a case study of Party Amanah Negara (AMANAH). *Islam and Civilisation Renewal*. 8(4):457-472.
- Mutalib, Muhammad Faiz Mukmin Abdul dan Wan Fariza Alyati Wan Zakaria. 2015. Pasca – Islamisme PAS: Analisis terhadap kesan tahaluf siyasi. *International Journal of Islamic Thought*. 8 (Dec): 52-60.
- Rosdi, Mohd Syakir Mohd. 2015. The role of tahaluf siyasi in political unity. *International Journal of Humanities and Social Science*. 5 (7):59-71.
- Salleh, Muhammad Syukri dan Mohd Syakir Mohd Rosdi. 2014. Islamic political economy: a special Reference to the use of tahaluf siyasi in the state of Kelantan, Malaysia. *American International Journal of Contemporary Research*. 4 (5): 118-130.
- Sejarah AMANAH. <https://amanah.org.my/sejarah/> 21 Mei 2018.
- United Malays National Organization. <https://www.britannica.com/topic/United-Malays-National-Organization>. 21 Juni 2018.